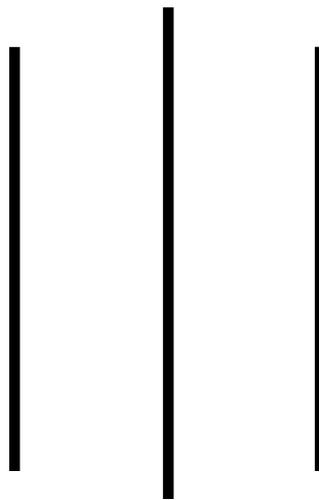




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKIP)

TAHUN 2021



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PERINDUSTRIAN**

2022

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Rahmat dan Ridho-Nya sehingga LKIP Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin untuk periode bulan Januari sampai dengan Desember 2021 ini dapat disusun.

Dalam rangka mendukung terwujudnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin melaporkan pencapaian kinerja sebagai bahan pertanggungjawaban dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi unit kerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini telah merangkum seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin pada tahun anggaran 2021.

Sebagai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) periode bulan Januari sampai dengan Desember 2021 yang telah dilalui, kami sadari masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan guna perbaikan pada penyusunan LKIP pada tahun berikutnya.

Pada kesempatan ini juga kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKIP Tahun 2021 Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin.

Akhirnya semoga LKIP Tahun Anggaran 2021 ini memberikan kontribusi bagi terwujudnya pemerintahan yang baik (Good Governance) secara umum di Kabupaten Tapin dan secara khusus pada lingkungan Dinas Perindustrian.

Kepala Dinas Perindustrian
Kabupaten Tapin,

Rosaria Sari, AP, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19740415 199311 2 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan “*Good Governance*”, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas yang diharapkan tidak hanya akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat tetapi juga akuntabilitas kepada Presiden. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tapin menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

LKIP ini memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2021, yang diformulasikan dari hasil kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal ini dikarenakan setiap SKPD dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas pokok dan fungsinya serta mempertanggungjawabkan program dan kegiatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

LKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini setiap SKPD dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| IKHTISAR EKSEKUTIF | iii |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. LATAR BELAKANG | 1 |
| B. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI | 2 |
| 1. Struktur Organisasi | 2 |
| 2. Tugas Pokok dan Fungsi..... | 4 |
| C. Permasalahan Utama Yang Sedang Dihadapi Organisasi | 5 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 7 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... | 10 |
| A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI | 13 |
| 1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2021..... | 14 |
| 2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Tahun 2020 | 15 |
| 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi | 17 |
| 4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan..... | 18 |
| 5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya..... | 20 |
| 6. Analisis Program Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja..... | 22 |
| B. REALISASI ANGGARAN | 22 |
| BAB IV PENUTUP..... | 23 |

DAFTAR LAMPIRAN :

Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja

Lampiran 2 : Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Lampiran 3 : Indikator Kinerja Utama (IKU)

Lampiran 4 : Laporan Capaian Kinerja Per Triwulanan

Lampiran 5 : Laporan Pengawasan Anggaran Definitif Per Kegiatan (SIMDA)

Lampiran 6 : Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Selanjutnya, sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

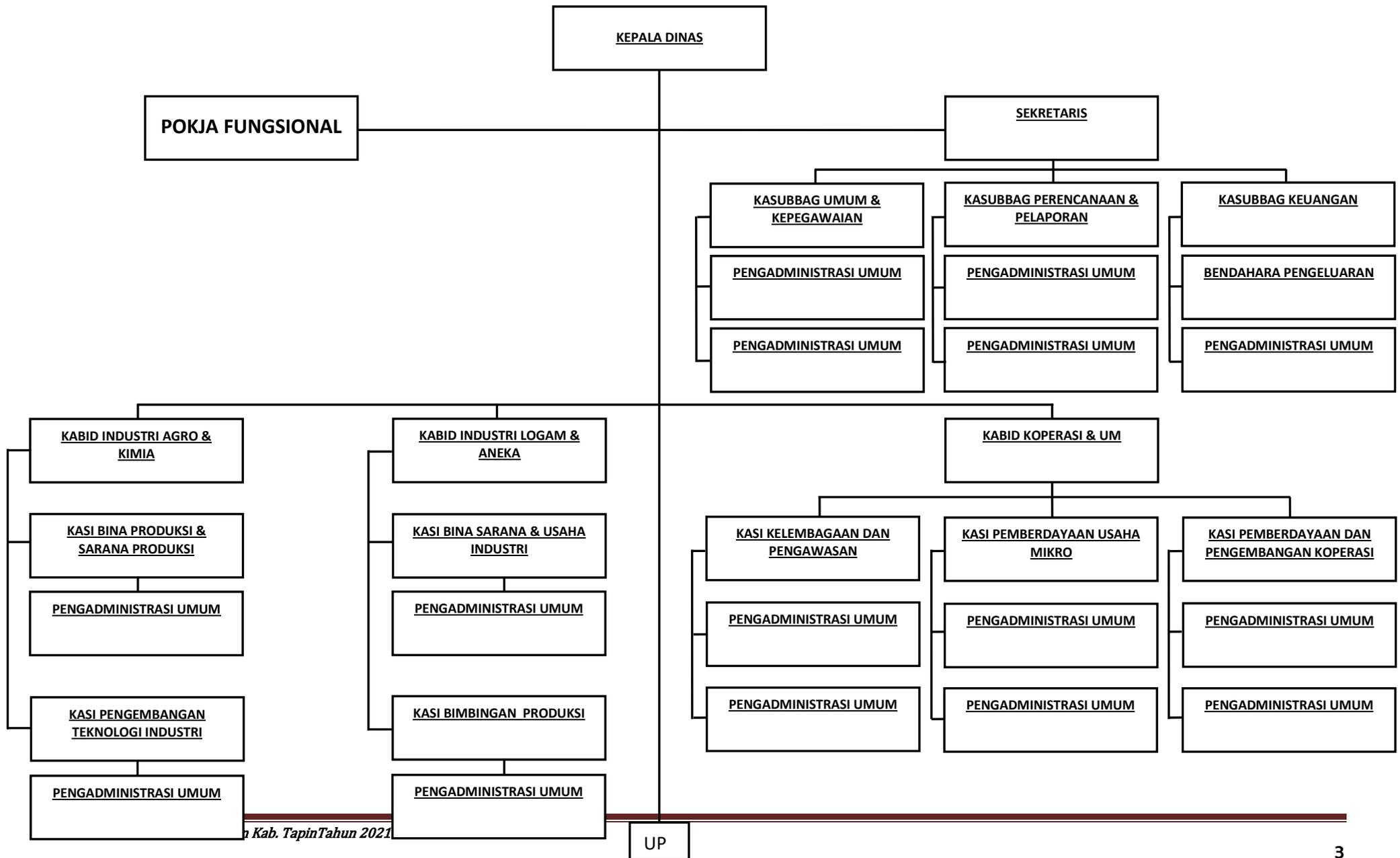
Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; setiap Pemerintah Daerah (Pejabat Eselon II) diminta untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya “*Good Governance*”.

B. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah antara lain Dinas Perindustrian, maka Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :



2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dengan ditetapkannya Perda Nomor 09 Tahun 2016 secara konsekuensi membawa perubahan terhadap perangkat daerah dan struktur organisasi teknis kelembagaan yang ada di Kabupaten Tapin.

Pemisahan kembali Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menjadi Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin dan Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin. Kemudian di pertegas kembali dalam Keputusan Bupati Tapin Nomor 19 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin. Adapun uraian tugas yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- b. mengoordinasikan, membina dan mengawasi penetapan rencana pembangunan industri kabupaten;
- c. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan dan penyelenggaran kebijakan teknis bidang Industri kerajinan dan aneka;
- d. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan dan penyelenggaran kebijakan teknis bidang pengembangan industri kecil dan menengah;
- e. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan dan penyelenggaran kebijakan teknis bidang koperasi dan usaha mikro;
- f. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah;

- g. menyelenggarakan pembinaan teknis dan administrasi terhadap Unit Pelaksana Teknis;
- h. membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

C. Permasalahan Utama Yang Sedang Dihadapi Organisasi

Permasalahan utama adalah isu strategis yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, permasalahan utama diidentifikasi dari berbagai sumber antara lain diangkat dari situasi dan kondisi ekonomi saat ini serta kemungkinan kondisi dimasa depan.

Setelah melakukan kajian terhadap kondisi permasalahan dari berbagai aspek pembangunan Perindustrian Kabupaten Tapin dapat dirumuskan beberapa kebijakan permasalahan utama atau isu-isu srategis yang dihadapi. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting baik bagi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) maupun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin pada setiap masing-masing periodenya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD dapat dibagi ke dalam faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor terkait kewenangan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berada diluar kewenangan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin. Berikut akan dijabarkan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin :

a. Faktor Internal

- 1) Pemanfaatan sumber daya alam yang belum optimal.
- 2) Sistem pengumpulan data dan informasi yang sebagian belum akurat.
- 3) Kurangnya promosi hasil produk UM dan IKM.
- 4) Pembinaan pengrajin yang belum optimal.
- 5) Kapasitas SDM pengurus koperasi yang masih rendah.

b. Faktor Eksternal

- 1) Kurangnya minat masyarakat terhadap kerajinan khas daerah.
- 2) Kualitas sumber daya manusia pelaku usaha pengrajin masih terbatas.
- 3) Bahan baku produksi dan bahan pendukung produksi yang masih sulit diperoleh dan harga bahan baku yang kurang kompetitif.
- 4) Hillirisasi industri dan industri yang bernilai tambah masih belum optimal.
- 5) Peningkatan Produktivitas dan Kompetensi SDM Industri masih belum optimal.
- 6) Kurang terampilnya sumber daya manusia yang ada terhadap penerapan dan penggunaan teknologi industri secara tepat dan efisien.
- 7) Rendahnya tingkat partisipasi anggota dalam pengembangan kegiatan usaha koperasi.
- 8) Kurang tersosialisasi peraturan perkoperasian pada gerakan koperasi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka diharapkan melalui Perjanjian Kinerja terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia, kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi (*outcome*) yang seharusnya terwujud oleh kegiatan-kegiatan sebelumnya.

Sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023, bahwa Kepala Daerah terpilih sudah menetapkan Visi pembangunan, yaitu : **“Bersama Mewujudkan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis”**. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, maka misi yang diemban oleh Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

1. Misi Pertama

Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing.

2. Misi Kedua

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa.

3. Misi Ketiga

Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan.

4. Misi Keempat

Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5. Misi Kelima

Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government).

Sebagai salah satu perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi untuk merealisasikan Visi dan Misi pembangunan tersebut, serta sebagai pedoman dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan, maka Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin terkait dengan Misi Kedua “ Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa ” dengan tujuan “ Meningkatnya kemandirian dan pemerataan ekonomi daerah “ yang kemudian dituangkan dalam 2 (dua) sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Sektor Agrobisnis.
2. Meningkatnya sektor koperasi dan UKM.

Dari kedua sasaran diatas, maka dihasilkan 2 (dua) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja sebagai alat ukur atas keberhasilan dan kegagalan yang kemudian menjadi kesepakatan antara Kepala Daerah dengan Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK).

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perjanjian Kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang akan dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan adanya Perjanjian Kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 berpedoman pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian Tahun 2018-2023. Berikut ini adalah tabel Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian Tahun 2021 :

Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Perindustrian Tahun 2021

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|---------------|
| Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas dan Pertumbuhan UMKM | Persentase Koperasi Berkualitas | 32,50% |
| | Persentase Usaha Mikro yang labanya meningkat | 84% |
| Meningkatnya Perkembangan dan Daya Saing Industri | Persentase PDRB Sektor Perindustrian | 6,26% |

Program

Anggaran :

Keterangan

| | | | | |
|--------------------------|---|-----------|----------------------|------|
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Rp | 3.222.015.857 | APBD |
| 2 | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA | Rp | 8.289.800 | APBD |
| 3 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Rp | 784.775.200 | APBD |
| 4 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | Rp | 697.990.000 | APBD |
| 5 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Rp | 12.699.800 | APBD |
| 6 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | Rp | 27.799.800 | APBD |
| 7 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Rp | 6.549.800 | APBD |
| 8 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Rp | 452.597.500 | APBD |
| Jumlah Anggaran : | | Rp | 5.212.717.757 | |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas / pemberi amanah.

Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yang utama adalah bahwa pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik, fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program / kegiatan yang direncanakan. Manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program / kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan pada level keluaran (*output*) maupun hasil (*outcome*). Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip “*Good Governance*” dimana salah satu pilarnya yaitu akuntabilitas, yang akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintah telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat.

Dalam hal ini Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Sedangkan untuk skala pengukuran ordinal (skala penilaian) terhadap kinerja pemerintah adalah sebagai berikut :

- 85% - 100% : Sangat Berhasil
- 70% - <85% : Berhasil
- 55% - <70% : Cukup Berhasil

- <55% : Tidak Berhasil

Indikator Kinerja pada LKIP Kabupaten Tapin yang terkait dengan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin, yang diantaranya adalah :

- ✓ Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB, dan

| Lapangan Usaha | Tahun | | |
|--|-------|-------|-------|
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| A Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan | 20,54 | 21,22 | 20,45 |
| B Pertambangan dan Penggalian | 28,61 | 26,53 | 26,64 |
| C Industri Pengolahan | 6,83 | 6,85 | 6,65 |
| D Pengadaan Listrik dan Gas | 0,10 | 0,10 | 0,11 |
| E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,32 | 0,33 | 0,32 |
| F Konstruksi | 5,71 | 5,86 | 5,85 |
| G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 10,17 | 10,65 | 10,80 |
| H Transportasi dan Pergudangan | 3,25 | 3,33 | 3,32 |
| I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 2,36 | 2,40 | 2,44 |
| J Informasi dan Komunikasi | 3,63 | 3,72 | 3,98 |
| K Jasa Keuangan dan Asuransi | 1,18 | 1,24 | 1,30 |
| L Real Estate | 1,41 | 1,43 | 1,51 |
| M,N Jasa Perusahaan | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 7,72 | 8,08 | 8,08 |
| P Jasa Pendidikan | 5,24 | 5,32 | 5,44 |

| | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 1,85 | 1,85 | 1,99 |
| R,S,T,U Jasa lainnya | 0,97 | 0,97 | 0,99 |
| PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO NON MIGAS | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

*Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2019: Angka sementara, Tahun 2020: Angka sangat sementara*

Berdasarkan tabel diatas Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Tapin dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuasi dari tahun 2018 sebesar 6,83% kemudian mengalami kenaikan sebesar 0,02% di tahun 2019 menjadi 6,85%, setelah itu kembali menurun sebesar 0,2% di tahun 2020 menjadi 6,65%. lebih rendah dari target Pemerintah Kabupaten Tapin untuk tahun 2021 sebesar 7,6% , terdapat selisih sebesar 0,95%. Data ini bersumber dari BPS Kab. Tapin berdasarkan angka sangat sementara tahun 2020 dikarenakan data untuk tahun 2021 masih belum dikeluarkan oleh BPS Kab. Tapin.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja organisasi digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran target kinerja dan sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin.

1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Perbandingan antara Target dan Realisasi adalah untuk mengetahui apakah sasaran strategis Dinas Perindustrian pada tahun yang bersangkutan telah sesuai dengan target yang telah di rencanakan sebelumnya :

| Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2021 | | Capaian Sasaran (%) | Kategori | Sumber Data |
|--|--------|------------|-----------|---------------------|--|------------------------|
| | | Target | Realisasi | | | |
| Sasaran ke-1 : Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas dan Pertumbuhan UMKM | | | | | | |
| Persentase Koperasi Berkualitas | % | 32,50 | 8,11 | 24,95% | "Tidak Berhasil" | Bidang Koperasi dan UM |
| Persentase Usaha Mikro yang labanya meningkat | % | 84 | 0 | 0% | "Tidak Berhasil" | Bidang Koperasi dan UM |
| Sasaran ke-2 : Meningkatnya Perkembangan dan Daya Saing Industri | | | | | | |
| Persentase PDRB Sektor Perindustrian | % | 6,26 | 5,99 | 95,68% | Tercapai dengan predikat "Sangat Berhasil" | BPS |

Untuk penjelasan atas capaian indikator kinerja diuraikan sesuai pada setiap sasaran sebagaimana dibawah ini :

a) Sasaran Strategis I

Sasaran strategis "Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas dan Pertumbuhan UMKM" terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu : Persentase Koperasi Berkualitas (dengan persentase capaian sasaran: 24,95%) dan Persentase Usaha Mikro yang labanya meningkat (0%).

Secara keseluruhan, realisasi capaian kinerja semua indikator sasaran strategis I dapat dikatakan Tidak Berhasil.

b) Sasaran Strategis II

Sasaran strategis “Meningkatnya Perkembangan dan Daya Saing Industri” dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu: Persentase PDRB Sektor Perindustrian (dengan persentase capaian sasaran: 95,68%). Data ini bersumber dari BPS Kab. Tapin. berdasarkan angka sangat sementara tahun 2020 dikarenakan data untuk tahun 2021 masih belum dikeluarkan oleh BPS Kab. Tapin.

Berdasarkan data dari BPS Kab. Tapin Persentase PDRB Sektor Perindustrian Kab. Tapin tahun 2020 sebesar 5,99% lebih tinggi dari Kabupaten Balangan pada tahun yang sama sebesar 1,98%, terdapat selisih sebesar 4,01%. Data ini bersumber dari BPS Kab. Tapin berdasarkan angka sangat sementara tahun 2020 dikarenakan data untuk tahun 2021 masih belum dikeluarkan oleh BPS Kab. Tapin.

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu ataupun tahun terakhir adalah untuk mengetahui Realisasi Kinerja tahun bersangkutan dengan tahun-tahun yang lalu apakah mengalami peningkatan atau penurunan dalam setiap tahunnya. Berikut ini disajikan perbandingan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya dengan Realisasi kinerja Tahun 2021 sesuai dengan tabel dibawah ini :

| Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi (2021) | Capaian Sasaran (%) | Realisasi (2020) | Capaian Sasaran (%) | Realisasi (2019) | Capaian Sasaran (%) | Sumber Data |
|--|--------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------|
| Sasaran ke-1 : Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas dan Pertumbuhan UMKM | | | | | | | | |
| Persentase Koperasi Berkualitas | % | 8,11 | 24,95 | 25,64 | 85,75 | 25,64 | 93,57 | Bidang Koperasi dan UM |
| Persentase Usaha Mikro yang labanya meningkat | % | 0 | 0 | 83 | 101,21 | 83 | 103,75 | Bidang Koperasi dan UM |
| Sasaran ke-2 : Meningkatnya Perkembangan dan Daya Saing Industri | | | | | | | | |
| Persentase PDRB Sektor Perindustrian | % | 5,99 | 95,68 | 6,13 | 98,23 | 6,14 | 98,71 | BPS |

- a. Indikator Kinerja Persentase Koperasi Berkualitas untuk Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021 lebih rendah dari Tahun 2020 dan tahun 2019.
- b. Indikator Kinerja Persentase Usaha Mikro yang labanya meningkat untuk Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021 lebih rendah dari Tahun 2020 dan Tahun 2019.
- c. Indikator Kinerja Persentase PDRB Sektor Perindustrian untuk Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021 lebih rendah dari Tahun 2020 dan Tahun 2019.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan ini untuk mengetahui apakah sasaran strategis dan capaian setiap tahunnya telah sesuai dengan perencanaan Jangka Menengah Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin (Renstra Tahun 2018-2023).

Berikut ini adalah tabel Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin beserta target dan realisasinya sampai dengan tahun 2021 yang termuat dalam Renstra 2018-2023 :

| SASARAN | | Target Kinerja Sasaran pada tahun | | | | | Tahun 2023 |
|---|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|------------|
| | | Tahun 2018 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | |
| | | Target (Realisasi) | Target (Realisasi) | Target (Realisasi) | Target (Realisasi) | Target | |
| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas dan Pertumbuhan UMKM | Persentase Koperasi Berkualitas | 25% (25,64%) | 27,4% (25,64%) | 29,90% (25,64%) | 32,5% (8,11%) | 35% | 37,6% |
| | Persentase Usaha Mikro yang labanya meningkat | 78% (80%) | 80% (83%) | 82% (83%) | 84% (0%) | 86% | 88% |
| Meningkatnya Perkembangan dan Daya Saing Indutri | Persentase PDRB SektorPerindustrian | 6,21% (6,21%) | 6,22% (6,14%) | 6,24% (6,13%) | 6,26% (5,99%) | 6,28% | 6,30% |

- a. Realisasi Kinerja Persentase Koperasi Berkualitas untuk Tahun 2021 sebesar 8,11% lebih rendah dari Tahun 2020 dan mengalami penurunan sebesar 24,39% dari Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis untuk Tahun 2021 sebesar 32,50%.
- b. Realisasi Kinerja Persentase Usaha Mikro yang labanya meningkat untuk Tahun 2021 sebesar 0% lebih rendah dari Tahun 2020 dan mengalami penurunan sebesar 84% dari Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis untuk Tahun 2021 sebesar 84%.
- c. Realisasi Kinerja Persentase PDRB Sektor Perindustrian untuk Tahun 2021 sebesar 5,99% mengalami penurunan 0,14% dari Tahun 2020 dan 0,27% dari Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis untuk Tahun 2021 sebesar 6,26%.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

| Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2021 | | Capaian Sasaran (%) | Kategori | Sumber Data |
|--|--------|------------|-----------|---------------------|------------------|------------------------|
| | | Target | Realisasi | | | |
| Sasaran ke-1 : Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas dan Pertumbuhan UMKM | | | | | | |
| Persentase Koperasi Berkualitas | % | 32,50 | 8,11 | 24,95% | "Tidak Berhasil" | Bidang Koperasi dan UM |
| Persentase Usaha Mikro yang labanya meningkat | % | 84 | 0 | 0% | "Tidak Berhasil" | Bidang Koperasi dan UM |

Sasaran meningkatnya Koperasi Berkualitas dan UMKM dengan Indikator Kinerja Persentase Koperasi Berkualitas dan Persentase Usaha Mikro yang labanya meningkat dengan kategori Tidak Berhasil.

| Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2021 | | Capaian Sasaran (%) | Kategori | Sumber Data |
|--|--------|------------|-----------|---------------------|--|-------------|
| | | Target | Realisasi | | | |
| Sasaran ke-2 : Meningkatnya Perkembangan dan Daya Saing Industri | | | | | | |
| Persentase PDRB Sektor Perindustrian | % | 6,26 | 5,99 | 95,68% | Tercapai dengan predikat "Sangat Berhasil" | BPS |

Sasaran meningkatnya Perkembangan dan Daya Saing Industri dengan Indikator Kinerja Persentase PDRB Sektor Perindustrian dengan Capaian Sasaran di atas 90% dapat dikategorikan Sangat Berhasil. Jumlah unit usaha di sektor industri di Kabupaten Tapin tahun 2021 sebanyak 7.216 mengalami peningkatan sebesar 1,3% dibanding tahun 2020 sebanyak 7.123 dengan Persentase PDRB Sektor Perindustrian sebesar 5,99%. Pada tahun 2021 kelompok industri di Kabupaten Tapin didominasi oleh Industri Kimia, Argo dan Hasil Hutan (IKAHH) yaitu sebesar 87,39%. Data ini bersumber dari BPS Kab. Tapin berdasarkan angka sangat sementara tahun 2020 dikarenakan data untuk tahun 2021 masih belum dikeluarkan oleh BPS Kab. Tapin.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian Sasaran | Program | Anggaran | Realisasi | Capaian Sasaran |
|---|---|--------|-----------|-----------------|---|-------------|-------------|-----------------|
| Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas dan Pertumbuhan UMKM | Persentase Koperasi Berkualitas | 32,50 | 8,11 | 24,95% | Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | 42.487.500 | 31.550.000 | 74.25 |
| | Persentase Usaha Mikro yang labanya meningkat | 84 | 0 | 0% | Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM | 3.025.000 | 0 | 0 |
| | | | | | Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM | 30.025.000 | 0 | 0 |
| Meningkatnya Perkembangan dan Daya Saing Industri | Persentase PDRB Sektor Perindustrian | 6,26 | 5,99 | 95,68% | Program Pembinaan, Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro dan Kimia | 732.100.000 | 241.778.540 | 33.02 |
| | | | | | Program Pembinaan, Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika | 170.530.000 | 165.979.500 | 97.33 |
| Capaian Kinerja rata-rata | | | | 56,84% | | 978.167.500 | 439.308.040 | 44.50% |

Secara umum Program dan Kegiatan APBD Dinas Perindustrian Kab. Tapin Tahun Anggaran 2021 sudah bisa terlaksana dengan capaian kinerja rata-rata sebesar 95,06%. Dengan capaian kinerja yang lebih tinggi dari realisasi anggaran belanja langsung 95,06% > 44,50%, Dinas Perindustrian Kab. Tapin lebih efisien dalam menggunakan anggaran belanja di Tahun 2021.

Realisasi Anggaran Belanja pada tahun 2021 sebesar 44,50% yang sangat rendah dikarenakan adanya kebijakan pemerintah dalam menerapkan protokol Kesehatan sebagai upaya mencegah penyebaran pandemi Covid-19 sehingga beberapa kegiatan mengalami penghapusan (Refocusing), kegiatan dialihkan untuk Percepatan Penanganan Covid - 19 di Kabupaten Tapin.

Pada setiap bidang yang ada di Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin, terdapat beberapa kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dimana kegiatan tersebut lebih banyak berupa pembinaan maupun pelatihan. Pada bidang koperasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang ada, yakni pengurus, pengawas dan anggota koperasi di Kabupaten Tapin dengan diadakannya kegiatan yang berupa penyuluhan, sosialisasi maupun pelatihan. Sedangkan pada bidang industri lebih mengarah kepada pemanfaatan sumber daya alam yang ada untuk bisa dijadikan sebagai bahan kerajinan disamping berusaha meningkatkan kemampuan para sumber daya manusianya atau para pelaku usaha industri yang ada di Kabupaten Tapin.

6. Analisis Program Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan

Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Berikut ini adalah tabel pencapaian kinerja disertai program pada tahun 2021

yang mempunyai pengaruh besar sebagai penunjangnya :

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) | Program | Anggaran |
|---|---|--------|-----------|-------------|---|-------------|
| Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas dan Pertumbuhan UMKM | Persentase Koperasi Berkualitas | 32,50 | 8,11 | 24,95% | Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | 42.487.500 |
| | Persentase Usaha Mikro yang labanya meningkat | 84 | 0 | 0% | Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM | 3.025.000 |
| | | | | | Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM | 30.025.000 |
| Meningkatnya Perkembangan dan Daya Saing Industri | Persentase PDRB Sektor Perindustrian | 6,26 | 5,99 | 95,68% | Pembinaan, Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika | 732.100.000 |
| | | | | | Pembinaan, Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro dan Kimia | 170.530.000 |

B. REALISASI ANGGARAN

Salah satu faktor utama penunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis adalah melaksanakan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dengan semaksimal mungkin.

BAB IV

PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Perindustrian telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang dapat dikategorikan berhasil atas sasaran-sasaran strategisnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin, serta dalam rangka perwujudan “*Good Governance*”. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Dinas Perindustrian Kabupaten.

Tapin sebagai jabaran visi, misi dan strategi Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaran pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien.

Untuk melihat prospek ke depan, Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin merasakan perlu adanya peningkatan alokasi dana yang lebih besar untuk bisa memacu penanganan kerajinan, mengingat sumber daya alam yang masih cukup besar dan produk unggulan daerah yang cukup potensial untuk dikembangkan secara optimal, agar menjadi lebih bermakna dan produktif sehingga mampu memberikan kontribusi baik untuk meningkatkan pendapatan masyarakat maupun perekonomian dan pendapatan asli daerah melalui setiap bidang yang ada.